

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Kajian Teori

1. Pengertian Kaderisasi

Undang-Undang Partai Politik No. 2 tahun 2011 pada Pasal 29 Ayat (2) Bab XI tentang Rekrutmen Politik yang berbunyi. Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan perundang-undangan.

Kaderisasi politik dan sosialisasi politik merupakan dua hal yang saling berkaitan, karena Kaderisasi politik merupakan salah satu bagian dari sosialisasi politik. Sosialisasi politik adalah suatu proses memperkenalkan sistem politik kepada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik (Hafied Cangara, 2008, hlm. 25).

Kaderisasi politik merupakan proses pengisian jabatan-jabatan pada lembaga-lembaga politik termasuk partai politik dan administrasi atau birokrasi oleh orang-orang yang akan menjalankan kekuasaan politik (Suharno, 2004, hlm. 117).

Partai politik tidak bisa dilepaskan dengan proses kaderisasi di dalamnya apabila partai memiliki kader-kader yang baik dan berkualitas, maka partai tersebut akan mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Hal tersebut menjadi sangat penting karena dengan memiliki kader yang baik, maka partai tersebut tidak akan kesulitan dalam menentukan pemimpinnya sendiri dan memiliki peluang untuk mengajukan calon ke bursa kepemimpinan nasional. Selain itu, rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjangkau dan melatih calon-calon pemimpin. Ada berbagai cara

yang dapat dilakukan dalam Kaderisasi politik, antara lain melalui kontak pribadi, persuasi, ataupun cara-cara lainnya (Miriam Budiardjo, 2008, hlm. 408).

Kaderisasi menurut Islam diartikan sebagai usaha mempersiapkan calon-calon pemimpin hari esok yang tangguh dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas khairu ummah, umat terbaik. Ini sesuai dengan seruan Allah dalam Al-Qur'an.

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik". (Q.S. Ali Imran: 110)

Dalam kaderisasi pasti memberikan pengarahan dan pelatihan. Masalahnya adalah terkadang atau sering hal – hal yang disampaikan tidak dilakukan oleh pemberi pelatihan di kehidupan sebenarnya. Contoh dalam kaderisasi pemberi pelatihan mengatakan bahwa kita harus disiplin, tapi ternyata ketika dia rapat untuk mempersiapkan kaderisasi, dia sering terlambat. Hal inilah yang membuat banyak kaderisasi saat ini tidak berjalan. Rasulullah, dalam mengkader, tidaklah sembarangan. Beliau melakukan apa yang ia katakan. Sehingga kadernya menjadi taat dan melaksanakan apa yang beliau serukan. Allah swt juga telah mengingatkan kunci kaderisasi yang sukses dalam Al-Qur'an.

Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan" (Q.S. Ash-Shaff: 2-3)

Selanjutnya Rasulullah dalam melakukan kaderisasi selalu teratur dan terencana. Contoh diatas sudah cukup membuktikan bahwa kaderisasi yang beliau bangun selalu terencana dengan sangat baik. Allah swt memberi kunci kaderisasi selanjutnya dalam Al-Qur'an.

Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh” (Q.S. Ash-Shaff: 4)

Istilah kader atau kaderisasi (proses pengkaderan) bukan sekedar predikat formal yang dimiliki oleh seseorang karena mengikuti pendidikan dan latihan tertentu, dan karena berbagai sertifikat formal yang dimiliki. Istilah kader lebih mengacu pada dimensi substansial berupa kualitas perjuangan yang dimiliki seseorang. Kaderisasi dipandang sebagai upaya yang sistematis, terus menerus dan berkelanjutan secara konsisten untuk menumbuhkan, mengembangkan dan membentuk insan-insan pejuang bangsa dengan kualitas dan karakteristik tertentu. Kaderisasi haruslah merupakan proses yang terus menerus, yang dirancang dan diarahkan secara tertib, teratur dan berjenjang. Komponen utama kaderisasi adalah:

- a. Pendidikan kader, dimana disampaikan berbagai pengetahuan yang dibutuhkan.
- b. Penugasan kader, dimana para kader diberi kesempatan untuk melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan organisasi sebagai latihan pematangan dan pendewasaan.
- c. Pengarahan karir kader, dimana para kader diberi tanggung jawab yang lebih besar dalam berbagai aspek perjuangan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada (H. Mangkubumi, hlm. 1989: 59).

Selain ketiga komponen di atas, seorang kader juga harus memiliki cita-cita dan idealisme untuk berjuang atau nasionalistik. Idealisme ini merupakan motivasi atau kekuatan pendorong seseorang untuk bersedia

berjuang atau melibatkan diri dalam perjuangan. Dewasa ini, kecenderungan materialistis yang terlihat ditengah masyarakat membuat motif perjuangan dirasa terlalu naif dan tidak realistis. Sudah semestinya seorang kader dituntut untuk memiliki kemampuan berjuang sesuai dengan kapasitas dan bidangnya masing-masing karena hanya dengan kapasitas seperti itulah tujuan perjuangan dapat dicapai.

Kemampuan profesional semakin lama semakin terasa dibutuhkan, mengingat konsekuensi dinamika dan perkembangan masyarakat yang semakin membutuhkan diferensiasi dan spesialisasi. Kedua hal tersebut merupakan salah satu ciri perkembangan ke arah modernisasi yang perlu disadari sepenuhnya dan diberi respon dengan meningkatkan kapasitas dan profesionalisme. Seorang kader juga diharapkan memiliki stamina atau daya tahan perjuangan karena pada dasarnya tidak ada proses dari pembahasan tersebut dapat dilihat bahwa kaderisasi merupakan proses perjuangan seorang kader dimana dengan motivasi dan idealismenya yang tinggi diarahkan untuk memiliki karakteristik dan kualitas tertentu. Kaderisasi bukan merupakan proses yang cepat, akan tetapi berjenjang, sistematis, terus menerus dan cenderung memerlukan waktu yang cukup lama. Maka dari itu, kaderisasi pada setiap partai politik memiliki cara tersendiri untuk melatih kader mereka yang biasanya terkait dengan penanaman ideologi dan garis perjuangan partai.

Kaderisasi merupakan suatu proses pengkaderan yang dilaksanakan secara terus menerus, sistematis dan konsisten mencakup tidak saja aspek kognitif tetapi juga motivatif.

a. Pendidikan Kaderisasi

Kaderisasi sebagai pendidikan jangka panjang untuk pengoptimalan potensi-potensi kader dengan cara mentransfer dan menanamkan nilai-nilai tertentu, hingga nantinya akan melahirkan kader-kader yang tangguh.

kaderisasi suatu organisasi dapat dipetakan menjadi dua ikon secara umum. Pertama, pelaku kaderisasi (subyek). Dan kedua, sasaran kaderisasi (obyek).

Untuk yang pertama subyek atau pelaku kaderisasi sebuah organisasi adalah individu atau sekelompok orang yang dipersonifikasikan dalam sebuah organisasi dan kebijakan-kebijakannya yang melakukan fungsi regenerasi dan kesinambungan tugas-tugas organisasi. Sedangkan yang kedua adalah obyek dari kaderisasi, dengan pengertian lain adalah individu-individu yang dipersiapkan dan dilatih untuk meneruskan visi dan misi organisasi.

Kaderisasi merupakan kebutuhan internal organisasi yang tidak boleh tidak dilakukan. Layaknya sebuah hukum alam, ada proses perputaran dan pergantian disana. Namun satu yang perlu kita pikirkan, yaitu format dan mekanisme yang komprehensif dan mapan, guna memunculkan kader-kader yang tidak hanya mempunyai kemampuan di bidang manajemen organisasi, tapi yang lebih penting adalah tetap berpegang pada komitmen sosial dengan segala dimensinya.

Sukses atau tidaknya sebuah institusi organisasi dapat diukur dari kesuksesannya dalam proses kaderisasi internal yang di kembangkannya. Karena, wujud dari keberlanjutan organisasi adalah munculnya kader-kader yang memiliki kapabilitas dan komitmen terhadap dinamika organisasi untuk masa depan.

Jadi dalam pendidikan kaderisasi memiliki tugas atau tujuan sebagai proses humanisasi atau pemanusiaan dengan cara transofmasi nilai-nilai agar tri dharma perguruan tinggi dapat terwujud. Pemanusiaan manusia disini dimaksudkan sebagai sebuah proses mentransfer nilai-nilai yang membuat manusia agar mampu meningkatkan potensi yang dimilikinya (spiritual, intelektual dan moral). Jadi dengan sendirinya, dalam kaderisasi harus terdapat sebuah persiapan agar mampu beradaptasi dan berintegrasi melalui konsientisasi dalam proses dimana manusia mendapatkan kesadaran yang

terus semakin mendalam tentang realitas kultural yang melingkupi hidupnya dan akan kemampuannya untuk merubah realitas itu dalam ranah pembebasandari *dehumanisasi*, dalam hal pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

Maka dapat disimpulkan bahwa kaderisasi bukanlah agenda yang selesai dalam waktu yang singkat. Proses pendidikan hanya akan dapat berhasil ketika telah dijalankan secara simultan dan menyentuh aspek yang menyeluruh. Tidak sekedar mengajar tapi mendidik. Tidak hanya mengembangkan aspek kognitif, namun memaksimalkan aspek afektif dan psikomotorik. Dalam kegiatan ini, yang perlu dilakukan adalah peningkatan pengetahuan (aspek kognitif) dan peningkatan kesadaran dan dorongan berjuang (bersifat motivatif). Peningkatan pengetahuan dibutuhkan sebagai bekal untuk dapat melakukan pengamatan, agar analisis yang dilakukan berwawasan luas dan rasional terhadap berbagai persoalan yang ada di sekelilingnya. Tetapi meningkatnya pengetahuan tidaklah cukup tanpa diimbangi oleh adanya kesadaran dan dorongan untuk menggunakan pengetahuan yang didapat dalam rangka perjuangan menggapai tujuan (cita-cita). Dalam pendidikan kader perlu diberikan pengetahuan yang bersifat motivatif yang berdasarkan pada pengetahuan yang luas, sehat dan mendalam.

Proses pengkaderan atau kaderisasi yang dilakukan oleh parpol terhadap anggota partai calon kader merupakan kelanjutan dari fungsi parpol, yaitu fungsi edukasi (pendidikan) dan fungsi rekrutmen. Parpol sejatinya dalam menjalankan fungsi pendidikan politik tidak boleh pilih kasih—hanya kepada anggota saja—tetapi juga kepada semua warga negara. Namun demikian fungsi pendidikan politik tetap dijalankan oleh internal parpol sebagai kelanjutan dari fungsi rekrutmen, dimana parpol setelah merekrut individu-individu dari masyarakat menjadi anggota akan memberikan pendidikan politik.

Setiap anggota partai politik belum tentu otomatis menjadi kader partai. Bagi anggota yang tertarik untuk menjadi kader partai, terlebih dahulu haruslah mengikuti proses seleksi untuk menjadi kader. Kemudian setelah lulus seleksi, anggota tersebut harus mengikuti proses pengkaderan yang dilakukan oleh parpol dalam rangka pelaksanaan fungsi pendidikan politik. Selama mengikuti proses pengkaderan, calon kader itu akan mendapatkan pendidikan politik kader.

Pendidikan politik kader bertujuan untuk meningkatkan kualitas kader sebagai calon pelanjut kepemimpinan partai dan kehidupan organisasi. Pendidikan politik lebih berorientasi kepada pemantapan dan pengembangan program partai. Pendidikan ini lebih bersifat memelihara mekanisme demokrasi yang diklasifikasikan ke dalam tiga jenjang, yaitu:

1) Jenjang pertama pendidikan diarahkan untuk:

- (a) pemahaman arti berorganisasi,
- (b) menanamkan loyalitas terhadap organisasi,
- (c) memantapkan dedikasi. Jenjang ini biasanya diperuntukkan bagi kader pemula.

2) Jenjang kedua pendidikan diarahkan untuk:

- (a) membuka wawasan berpikir yang berdasar ideologi partai,
- (b) menumbuhkan dinamika dan kreativitas dalam pengembangan organisasi,
- (c) meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi jenjang ini diperuntukkan bagi kader madya.

3) Jenjang ketiga pendidikan diarahkan untuk:

- (a) membentuk sumber insani organisasi yang memiliki kemampuan konseptual,
- (b) membidik cara berpikir sistematis dan strategis,
- (c) membidik agar memiliki kemampuan menganalisis peristiwa politik,
- (d) mendidik berpikir futuristic. Jenjang ini diperuntukkan bagi calon-calon politisi.

b. Pengembangan Kaderisasi

Pengembangan kader bertujuan untuk mematangkan dan mendewasakan kader melalui tantangan yang terdapat di tengah masyarakat, melalui akumulasi pengalaman dan penghayatan atas kehidupan masyarakat, sehingga menumbuhkan suatu bentuk kemampuan nyata sekaligus kearifan dalam menghadapi persoalan-persoalan yang ada. Pada tahap lebih lanjut, para kader diharapkan dapat mencari dan menemukan secara kreatif tantangan-tantangan tersebut dalam penghayatan dan pergumulannya di tengah masyarakat. Dengan demikian kemandirian akan tumbuh dan berkembang dalam dirinya, perjuangan mereka akan menjadi bagian dari jiwa dan kehidupannya. Pematangan dan pendewasaan kader inilah yang dirasakan sekarang ini sebagai bagian yang cukup sulit dalam melakukan kaderisasi (H. Mangkubumi, hlm. 1989: 62).

Dalam kegiatan kaderisasi, diharapkan tujuan akhir yang hendak dicapai yakni untuk menciptakan seorang kader yang tidak berpandangan atau berwawasan sempit, sektoral, dan hanya patuh secara buta terhadap satu kepentingan golongan tertentu tanpa melihat kepentingan nasional. Prinsip jiwa nasionalisme atau patriotisme ini menghendaki setiap kader secara sukarela dan ikhlas menempatkan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi atau golongan (H. Mangkubumi, hlm. 1989: 64).

Kata kunci yang menjadi fokus kaderisasi adalah masa depan, pendidikan, simultan, dan sinergisitas. Secara garis besar, empat kata itulah yang dapat mewakili kaderisasi. Adanya proses pendidikan simultan untuk mendidik kader-kader secara kolektif yang akan membentuk sinergisitas dalam gerak organisasi di masa depan. Karena kader harus berkualifikasi, maka dibutuhkan pendidikan. Karena pendidikan harus mencakup aspek yang komprehensif, maka dibutuhkan usaha jangka panjang dan berkelanjutan. Mengingat organisasi membutuhkan kerjasama, maka pembentukan kader harus melahirkan kesadaran dan kepemimpinan kolektif antar personal. Dan hasil yang diharapkan adalah tumbuhnya sinergitas antar pemimpin. Tidak hanya sinergisitas kerja, namun juga sinergis dalam bentuk keselarasan hati, sikap saling mengerti, dan mampu membentuk bangunan organisasi yang kuat.

Dari pemikiran di atas inilah ruh kaderisasi akan dimulai. Potensi dan tantangan sebuah proses kaderisasi memang selalu terasa lebih berat, namun janji balasan Tuhan berupa para penerus masa depan akan mampu menjadi obat lelahnya perjuangan ini. Terlalu banyak kegelisahan individual yang tersebar di masyarakat ini. Sekaranglah saatnya menyatukan kegelisahan-kegelisahan tersebut menjadi sebuah kepedulian kolektif yang akan meninggalkan jejak nyata perubahan masa depan.

Kaderisasi haruslah holistik. Banyak aspek yang harus dikembangkan dan tersentuh oleh kaderisasi untuk menghasilkan kader yang ideal. Aspek tersebut adalah

- 1) Fisikal (kesehatan)
- 2) Spiritual (keyakinan, agama, nilai)
- 3) Mental (moral dan etika, softskill, kepedulian)
- 4) Intelektual (wawasan, keilmuan, keprofesian)
- 5) Manajerial (keorganisasian, kepemimpinan)

Dari setiap aspek yang dikembangkan, harus ada sinergi dan keseimbangan agar tiap aspek bisa menunjang aspek yang lainnya sehingga potensi si kader teroptimalisasi.

c. **Masalah Pokok Kaderisasi**

Kaderisasi terencana dan berjenjang tampaknya belum menjadi bagian utama program dan strategi pengembangan parpol. Walaupun ada pengecualian, itu terjadi hanya pada satu–dua parpol. Masalah utama kepartaian di Indonesia adalah pelembagaan. Parpol terlembaga dicirikan oleh beberapa hal, sebagai contoh seperti masa hidup yang relatif panjang (lama), mengakar di masyarakat, mempunyai kesiapan personalia untuk menjalankan peran dalam aneka jabatan publik, mempunyai program kebijakan khusus yang menjadi identifikasi partai, dan suksesi kepemimpinan yang berlangsung teratur dan damai. Beberapa parpol berumur panjang, tetapi tidak mengakar di masyarakat. Demikian juga beberapa parpol mempunyai program khusus yang menjadi identifikasi partai, tetapi terpecah saat melangsungkan suksesi kepemimpinan. Ironi-ironi seperti ini bisa disusun dalam daftar panjang. Di luar itu, kecenderungan umum yang terlihat, banyak parpol tidak menunjukkan kesiapan dan ketersediaan personalia saat harus mengisi jabatan-jabatan publik badan-badan pemerintahan. Kelemahan pelembagaan parpol jelas merugikan kepentingan masyarakat.

Masyarakat yang seharusnya dilayani partai-partai politik dengan kader-kader yang berkualitas mempunyai tanggung jawab, bersih, dan berwawasan dalam menjalankan peran sebagai pejabat, kehilangan kepercayaan atas kinerja badan-badan pemerintahan (legislatif dan eksekutif). Pada kenyataannya badan-badan pemerintahan itu terisi oleh personalia yang kurang tepercaya yang disiapkan, diusulkan, atau didukung

parpol. Kini partai-partai politik dalam kehidupan pemerintahan di Indonesia merupakan sumber utama perekrutan untuk jabatan-jabatan publik.

Kenyataan itu menegaskan tumpuan keberhasilan kinerja pemerintahan Indonesia sebagian besar dalam pengaruh partai politik. Dengan kata lain parpol berperan penting bagi keberhasilan pemerintahan. Namun pada saat yang sama parpol dapat menjadi sumber masalah dan kegagalan pemerintahan di Indonesia. Kaderisasi partai politik yang berkesinambungan pada dasarnya menyiapkan seluruh aspek pelebagaan partai politik sekaligus menjamin keberhasilan pemerintahan. Ini juga berarti jaminan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Masalah kader dan non kader partai politik tidak akan muncul karena isu utama bukan seberapa besar partai politik akan menguasai pemerintahan, tetapi seberapa bermanfaat partai politik dalam pemerintahan memberikan kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

d. Bentuk Kaderisasi Partai Politik

1) Kaderisasi pasif

Kaderisasi pasif dilakukan secara insidental dan merupakan masa untuk kenaikan jenjang anggota. Pada momen ini, anggota mendapatkan pembinaan 'learning to know' dan sedikit '*learning to be*'. Pembinaan pasif sangat penting dan efektif dalam pembinaan dan penjagaan.

2) Kaderisasi aktif

Kaderisasi yang bersifat rutin dan sedikit abstrak, karena pada kaderisasi ini, anggotalah yang mencari sendiri materinya. Pada momen ini, anggota mendapatkan pembinaan '*learning to know*', '*learning to do*', dan '*learning to be*' sekaligus. Maka dalam hal ini sangat penting untuk dipahami, bahwa setiap rutinitas kegiatan, haruslah memberdayakan potensi anggota sekaligus menjadi bentuk pembinaan dan pengembangan aktif bagi anggota. Kaderisasi ini sangat baik dalam proses pembinaan, penjagaan, dan pengembangan secara sistematis.

e. Instrumen Terlibat Dalam Kaderisasi Partai Politik

Anggota Partai adalah Warga Negara Republik Indonesia yang setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dengan sukarela mengajukan permohonan menjadi anggota.

Kader Partai adalah anggota Partai yang merupakan tenaga inti dan penggerak Partai. Pembentukan Kader Partai dilaksanakan melalui seleksi Kaderisasi secara berjenjang didalam pendidikan dan latihan kader.

- 1) Strata Kader Partai :
 - a) Kader Penggerak.
 - b) Kader Pratama.
 - c) Kader Muda.
 - d) Kader Madya.
 - e) Kader Utama.
 - f) Kader Manggala.
- 2) Kader Partai dipersiapkan untuk menjadi:
 - a) Calon Pengurus Partai
 - b) Bakal calon Anggota DPR dan DPRD.
 - c) Bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - d) Bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.
- 3) Untuk mendapatkan kader-kader yang sesuai dengan anggota partai adalah sebagai berikut :
 - a) Warga Negara Indonesia
 - b) Berusia sekurang-kurangnya 17 tahun atau telah menikah
 - c) Bersedia mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta ketentuan-ketentuan partai lainnya
 - d) Bersedia menyatakan diri menjadi anggota partai politik

- e) Setiap Anggota berkewajiban mematuhi dan melaksanakan seluruh Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, mematuhi dan melaksanakan keputusan Kongres dan ketentuan Partai lainnya, mengamankan dan memperjuangkan kebijakan Partai, membela kepentingan Partai dari setiap usaha dan tindakan yang merugikan Partai, menghadiri rapat-rapat dan kegiatan Partai, berpartisipasi aktif dalam melaksanakan program perjuangan Partai, dan membayar iuran anggota (Hak Anggota).
- f) Setiap Anggota berhak memperoleh perlakuan yang sama, mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan, memilih dan dipilih, memperoleh perlindungan dan pembelaan, memperoleh pendidikan dan pelatihan kader, memperoleh penghargaan dan kesempatan mengembangkan diri (Tata Tertib Berakhirnya Keanggotaan).
- g) Keanggotaan berakhir ketika anggota: Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis, diberhentikan, meninggal dunia, atau Pindah ke partai lain.

Anggota dapat diberhentikan karena: Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota, melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga atau Keputusan Kongres, atau Rapat Pimpinan Nasional, atau Melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan keputusan atau kebijakan Partai.

2. Tinjauan Partai Politik

a. Pengertian Partai Politik

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk

melaksanakan programnya.

Carl J. Friedrich (dalam prof. Miriam Budiardjo, 2008 hlm. 404) mendefinisikan partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi pimpinan partainya, memberikan pada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal serta materiil (*A political party is a group of human beings, stably organized with the objective of securing or maintaining for its leaders the control of a government, with the further objective of giving to members of the party, through such control ideal and material benefits and advantages*).

Sigmund Neumann (dalam prof. Miriam Budiardjo, 2008 hlm. 404) mengemukakan bahwa partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda (*A political party is the articulate organization of society's active political agents; those who are concerned with the control of governmental polity power, and who compete for popular support with other groups holding divergent views*).

Giovanni Sartori (dalam prof. Miriam Budiardjo, 2008 hlm. 404-405) partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan, melalui pemilihan umum itu, mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan public (*A party is any political group that present at elections, and is capable of placing through elections candidate for public office*).

Undang-undang Nomor 2 Ayat 1 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Partai politik dibentuk dengan sengaja oleh sekelompok manusia yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu yang bersifat Nasional yang terbuka untuk semua kalangan orang untuk ikut andil dalam menjadi anggota partai dengan berpegang teguh pada Pancasila UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.

Menurut Dr. H. Sunatra, SH., MS., (2016, hlm. 99), Pendidikan politik dalam kerangka pendidikan kewarganegaraan sejalan dengan pendapat Branson (1998) karakteristik warga Negara melek politik adalah kompetensi kewarganegaraan (*civic competence*) yang diformulasikan kedalam tiga komponen penting, yaitu:

- 1) *Civic Knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan, berkaitan dengan kandungan atau apa yang seharusnya diketahui oleh warga Negara;
- 2) *Civic Skill* (kecakapan kewarganegaraan), adalah kecakapan intelektual dan partisipatoris warga Negara yang relevan;
- 3) *Civic Disposition* (watak kewarganegaraan) yang mengisyaratkan pada karakter public maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional.

b. Dasar Hukum Pembentukan Partai Politik

Menurut Undang-undang Keptaraan No. 2 Tahun 2011 Pasal 2:

- 1) Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi.
- (1a) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri Partai Politik dengan akta notaris.
- (1b) Pendiri dan pengurus Partai Politik dilarang merangkap sebagai anggota Partai Politik lain.

- 2) Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.
- 3) Akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) harus memuat AD dan ART serta kepengurusan Partai Politik tingkat pusat.
- 4) AD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit:
 - (1) asas dan ciri Partai Politik;
 - (2) visi dan misi Partai Politik;
 - (3) nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik;
 - (4) tujuan dan fungsi Partai Politik;
 - (5) organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan;
 - (6) kepengurusan Partai Politik;
 - (7) mekanisme rekrutmen keanggotaan Partai Politik dan jabatan politik;
 - (8) sistem kaderisasi;
 - (9) mekanisme pemberhentian anggota Partai Politik;
 - (10) peraturan dan keputusan Partai Politik;
 - (11) pendidikan politik;
 - (12) keuangan Partai Politik; dan
 - (13) mekanisme penyelesaian perselisihan internal Partai Politik.
- 5) Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.Hh-04.Ah.11.01 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Penyesuaian Partai Politik Berbadan Hukum Dan Partai Politik Baru Menjadi Badan Hukum Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

c. Tujuan Partai Politik

Dibentuknya partai politik di berbagai Negara mempunyai tujuan masing-masing sesuai dengan cita-cita dari partai politik tersebut yang diinginkan, tujuan partai politik dibedakan menjadi dua bagian yaitu tujuan secara umum dan tujuan secara khusus, dalam Undang-Undang Nomor 2 pasal 10 Tahun 2008 tentang partai politik, tujuan umum partai politik meliputi :

- 1) mewujudkan cita-cita Nasional Bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4) mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan umum partai politik, tidak terlepas dari tujuan khusus partai politik meliputi:

- a) meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka.
- b) penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan.
- c) memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa, dan bernegara.
- d) membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa, dan bernegara.

d. Kedudukan Partai Politik

Kedudukan partai politik adalah sebagai organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Definisi lainnya adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

e. Fungsi Partai Politik

Sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Pasal 11 Tahun 2008 Tentang Fungsi Partai Politik, penjelasan tentang fungsi partai politik adalah sebagai berikut:

- 1) Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 2) Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
- 3) Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- 4) Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
- 5) Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Sedangkan fungsi dari partai politik dinegara demokrasi seperti Indonesia terbagi menjadi empat bagian yaitu: sebagai sarana komunikasi politik' sebagai sarana social politik, sebagai sarana rekrutmen politik, sebagai sarana pengatur konflik (Conflict Management) (Miriam Budiarjo 2008, hlm 405-408). Penjelasan dari empat fungsi partai politik sebagai berikut:

- 1) Sebagai Sarana Komunikasi Politik

Partai politik bertindak sebagai salah satu sarana komunikasi dalam dunia politik. Jika dilihat segi ini, tugas yang dimiliki partai politik adalah sebagai penyalur berbagai macam pendapat dan aspirasi dari masyarakat yang nantinya akan ditampung dan disatukan menjadi satu kesatuan guna menghasilkan tujuan yang sama. Proses tersebut dinamakan *interest aggregation* atau penggabungan kepentingan dan sebagai perantara penyebar luasan kebijakan-kebijakan yang berasal dari pemerintah kepada warga negaranya. Dalam hal ini partai politik bertindak sebagai pendengar bagi pemerintah dan bertindak sebagai peneras usara bagi warga negara.

2) Sebagai Sarana Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik merupakan usaha untuk mentramisikan budaya politik dalam upaya membentuk sikap dan orientasi setiap anggota masyarakat selaku warga negara. Atau dengan kata lain, ini merupakan suatu pendidikan politik, dimana partai politik merupakan struktur penting dalam menanamkan cita-cita kenegaraan dalam kesadaran kolektif masyarakat. Dalam fungsi ini, partai politik akan berusaha memasyarakatkan berbagai visi, ide, serta kebijakan-kebijakan strategis yang dimilikinya guna mendapatkan tanggapan dari masyarakat yaitu berupa dukungan.

3) Sebagai sarana Rekrutmen Politik

Partai politik ikut serta dalam upaya memperluas partisipasi politik bagi warga negara, dimana merupakan suatu wahana untuk dapat melakukan penyeksian kader-kader yang nantinya akan memimpin negara pada tingkat maupun posisi jabatan tertentu yaitu dengan berusaha melakukan pencarian serta mengajak warga negara yang memiliki bakat untuk menjadi anggota partai untuk ikut serta dalam kegiatan partai. Setelah mereka masuk kedalam keanggotaan partai, maka partai

politik akan melakukan pembinaan serta mendidik kader-kader baru tersebut untuk menggantikan kader-kader yang lama.

4) Sebagai Sarana Pengatur Konflik (*Conflict Management*)

Suatu hal yang wajar apabila terjadi persaingan maupun beda pendapat yang terjadi pada masyarakat dalam suatu sistem demokrasi, dimana nilai-nilai dan kepentingan yang tumbuh dalam suatu lingkungan masyarakat memiliki berbagai keanekaragaman, rumit, serta cenderung terjadi persaingan antara yang satu dengan yang lain. Suatu negara yang memiliki jumlah partai politik yang banyak dimana setiap partai menawarkan ideologi, program, serta kebijakan-kebijakan alternatif yang berbeda-beda, maka melalui polarisasi partai politik tersebut beraneka ragam kepentingan masyarakat dapat disalurkan.

f. Organisasi Partai Politik

Organisasi partai politik adalah organisasi atau kelompok yang bergerak atau berkepentingan atau terlibat dalam proses politik dan dalam ilmu kenegaraan, secara aktif berperan dalam menentukan nasib bangsa tersebut. Organisasi politik dapat mencakup berbagai jenis organisasi seperti kelompok advokasi yang melobi perubahan kepada politisi, Dalam pengertian yang lebih luas, suatu organisasi politik dapat pula dianggap sebagai suatu sistem politik jika memiliki sistem pemerintahan yang lengkap.

Organisasi partai politik merupakan bagian dari suatu kesatuan yang berkepentingan dalam pembentukan tatanan sosial pada suatu wilayah tertentu oleh pemerintahan yang sah. Organisasi ini juga dapat menciptakan suatu bentuk struktur untuk diikuti. Sejarah organisasi partai politik di Indonesia:

a) Masa penjajahan Belanda,

Masa ini disebut sebagai periode pertama lahirnya partai politik di Indonesia (waktu itu Hindia Belanda). Partai Politik yang paling

pertama dibentuk di Indonesia adalah De Indische Partij pada 25 Desember 1912 oleh Douwes Dekker, Ki Hadjar Dewantara, dan Tjipto Mangunkoesoemo. Lahirnya partai menandai adanya kesadaran nasional. Pada masa itu semua organisasi baik yang bertujuan sosial seperti Budi Utomo dan Muhammadiyah, ataupun yang berasaskan politik agama dan sekuler seperti Serikat Islam, PNI dan Partai Katolik, ikut memainkan peranan dalam pergerakan nasional untuk Indonesia merdeka.

Kehadiran partai politik pada masa permulaan merupakan manifestasi kesadaran nasional untuk mencapai kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Setelah didirikan Dewan Rakyat, gerakan ini oleh beberapa partai diteruskan di dalam badan ini. Pada tahun 1939 terdapat beberapa fraksi di dalam Dewan Rakyat, yaitu Fraksi Nasional di bawah pimpinan M. Husni Thamim, PPBB (Perhimpunan Pegawai Bestuur Bumi Putera) di bawah pimpinan Prawoto dan Indonesische Nationale Groep di bawah pimpinan Muhammad Yamin.

Di luar dewan rakyat ada usaha untuk mengadakan gabungan partai politik dan menjadikannya semacam dewan perwakilan rakyat. Pada tahun 1939 dibentuk KRI (Komite Rakyat Indonesia) yang terdiri dari GAPI (Gabungan Politik Indonesia) yang merupakan gabungan dari partai-partai yang beraliran nasional, MIAI (Majelis Islamil • laa Indonesia) yang merupakan gabungan partai-partai yang beraliran Islam yang terbentuk tahun 1937, dan MRI (Majelis Rakyat Indonesia) yang merupakan gabungan organisasi buruh.

Pada tahun 1939 di Hindia Belanda telah terdapat beberapa fraksi dalam volksraad yaitu Fraksi Nasional, Perhimpunan Pegawai Bestuur Bumi-Putera, dan Indonesische Nationale Groep. Sedangkan di luar volksraad ada usaha untuk mengadakan gabungan dari Partai-

Partai Politik dan menjadikannya semacam dewan perwakilan nasional yang disebut Komite Rakyat Indonesia (K.R.I). Di dalam K.R.I terdapat Gabungan Politik Indonesia (GAPI), Majelisul Islami A'laa Indonesia (MIAI) dan Majelis Rakyat Indonesia (MRI). Fraksi-fraksi tersebut di atas adalah merupakan partai politik - partai politik yang pertama kali terbentuk di Indonesia.

b) Masa pendudukan Jepang

Pada masa ini, semua kegiatan partai politik dilarang, hanya golongan Islam diberi kebebasan untuk membentuk partai Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Partai Masyumi), yang lebih banyak bergerak di bidang sosial.

c) Masa pasca proklamasi kemerdekaan

Beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan, terbuka kesempatan yang besar untuk mendirikan partai politik, sehingga banyak bermunculan parti-partai politik Indonesia. Melalui Maklumat X yang diumumkan oleh Bung Hatta pada 3 November 1945 menjadi tonggak awal tumbuhnya partai politik pasca kemerdekaan.

Pemilu 1955 memunculkan 4 partai politik besar, yaitu : Masyumi, PNI, NU dan PKI. Masa tahun 1950 sampai 1959 ini sering disebut sebagai masa kejayaan partai politik, karena partai politik memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara melalui sistem parlementer. Sistem banyak partai ternyata tidak dapat berjalan baik. Partai politik tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, sehingga kabinet jatuh bangun dan tidak dapat melaksanakan program kerjanya. Sebagai akibatnya pembangunan tidak dapat berjaan dengan baik pula. Masa demokrasi parlementer diakhiri dengan Dekret 5 Juli 1959, yang mewakili masa masa demokrasi terpimpin.

Pada masa demokrasi terpimpin ini peranan partai politik mulai dikurangi, sedangkan di pihak lain, peranan presiden sangat kuat. Partai politik pada saat ini dikenal dengan NASAKOM (Nasional, Agama dan Komunis) yang diwakili oleh NU, PNI dan PKI. Pada masa Demokrasi Terpimpin ini tampak sekali bahwa PKI memainkan peranan bertambah kuat, terutama melalui G 30 S/PKI akhir September 1965).

Setelah itu Indonesia memasuki masa Orde Baru dan partai-partai dapat bergerak lebih leluasa dibanding dengan masa Demokrasi terpimpin. Suatu catatan pada masa ini adalah munculnya organisasi kekuatan politik baru yaitu Golongan Karya (Golkar). Pada pemilihan umum tahun 1971, Golkar muncul sebagai pemenang partai diikuti oleh 3 partai politik besar yaitu NU, Parmusi (Persatuan Muslim Indonesia) serta PNI.

Pada tahun 1973 terjadi penyederhanaan partai melalui fusi partai politik. Empat partai politik Islam, yaitu : NU, Parmusi, Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII) dan Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah) bergabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Lima partai lain yaitu PNI, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba dan Partai IPKI (ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia) bergabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia. Maka pada tahun 1977 hanya terdapat 3 organisasi kekuatan politik Indonesia dan terus berlangsung hingga pada pemilu 1997.

Setelah gelombang reformasi terjadi di Indonesia yang ditandai dengan tumbang rezim Suharto, maka pemilu dengan sistem multi partai kembali terjadi di Indonesia. Dan terus berlanjut hingga pemilu 2014 nanti.

Setelah merdeka, Indonesia menganut sistem Multi Partai sehingga terbentuk banyak sekali Partai Politik. Memasuki masa

Orde Baru (1965 - 1998), Partai Politik di Indonesia hanya berjumlah 3 partai yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia. Pada masa Reformasi, Indonesia kembali menganut sistem multi partai.

g. Keanggotaan Partai Politik

Politik merupakan sebuah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan baik secara konstitusional maupun non-konstitusional. Untuk dapat meraih kekuasaan tersebut maka dibentuk partai politik. Kekuasaan yang diraih digunakan untuk melaksanakan dan mewujudkan program-program yang telah disusun sesuai dengan ideologi.

Keanggotaan dari partai politik sendiri bersumber dari masyarakat dengan mengadakan rekrutment yang sehat antar partai. Menurut keterangan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), partai politik yang terdaftar sebagai badan hukum di Indonesia pada tahun 2016 ini tercatat sebanyak 73 partai politik dengan Partai Solidaritas Indonesia sebagai partai politik baru yang lolos verifikasi. Dalam perpolitikan, ditakutkan akan terjadi penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Di sinilah peran dari ilmu politik. Ilmu politik bertugas untuk mempelajari seluk-beluk perpolitikan baik tentang tata cara maupun peraturan karena ilmu politik menilai sesuatu dari sisi intelektual dengan pertimbangan yang kritis dan mempunyai kriteria yang sistematis. Namun, dewasa ini, banyak partai politik yang berlomba-lomba dalam rekrutmen anggota untuk partainya. Bahkan, tidak sedikit partai politik yang menghadirkan artis dalam tubuh partai. Keterlibatan artis ini menimbulkan tanda tanya tentang tujuan artis tersebut, apakah dilandasi dengan kepedulian terhadap masyarakat sehingga tumbuh kesadaran untuk berpartisipasi dalam politik atau hanya sekedar

memanfaatkan popularitasnya untuk mendongkrak eksistensi partai politik tersebut.

Sehingga tidak ada lagi diskriminasi terhadap golongan masyarakat bawah. Oleh karena itu harus diterapkan strategi-strategi yang baik. Partai politik juga harus memiliki standar seperti apa kader yang akan diterimanya. Alasan ditetapkan standar adalah untuk mengetahui kualitas tiap calon karena nantinya merekalah yang akan meneruskan tugas dari partai politik tersebut. Untuk meraih tujuan tersebut, diperlukan strategi yang bukan hanya omong kosong belaka. Tetapi, benar-benar strategi yang ketat agar kader yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik.

Anggota Partai GERINDRA adalah Warga Negara Republik Indonesia yang setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dengan sukarela mengajukan permohonan menjadi anggota.

Kader Partai GERINDRA adalah anggota Partai GERINDRA yang merupakan tenaga inti dan penggerak Partai. Pembentukan Kader Partai GERINDRA dilaksanakan melalui seleksi Kaderisasi secara berjenjang didalam pendidikan dan latihan kader.

- 1) Strata Kader Partai GERINDRA :
 - a) Kader Penggerak.
 - b) Kader Pratama.
 - c) Kader Muda.
 - d) Kader Madya.
 - e) Kader Utama.
 - f) Kader Manggala.
- 2) Kader Partai GERINDRA dipersiapkan untuk menjadi:
 - a) Calon Pengurus Partai
 - b) Bakal calon Anggota DPR dan DPRD.
 - c) Bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

d) Bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.

h. Kadeisasi Partai Politik

Partai politik adalah suatu alat yang penting dalam mengisi kemerdekaan negara, sebagai wahana penyalur segala aspirasi masyarakat guna untuk mencapai kesejahteraan hidup berbangsa dan bernegara, dinamika perpolitikan suatu bangsa ditentukan oleh partai politiknya, sehingga partai politik memiliki peran yang sangat besar sebagai sarana/media ataupun alat untuk memperoleh kekuasaan. Dalam prosesnya kekuasaan itu sendiri di Indonesia didapatkan melalui suatu pemilihan yang disebut dengan pemilihan umum, Pemilihan umum merupakan salah satu cara yang paling efektif dalam memilih suatu pemimpin, dengan pemilihan ini ekspektasinya mampu mencetak pemimpin-pemimpin yang berkualitas yang arief dan bijaksana karena dipilih secara langsung oleh rakyat yang memiliki hak untuk memilih yang biasa disebut dengan konstituen. Pemilu di Indonesia pada dasarnya ditujukan untuk memilih anggota legislatif dan eksekutif.

Setelah undang-undang dasar 1945 di amandemen untuk yang ke-4 kalinya maka proses pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia bukan berada ditangan lembaga majelis perwakilan rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi pada rezim sebelumnya. Akan tetapi setelah reformasi kedaulatan berada tangan rakyat dan rakyat diberi kesempatan penuh untuk memilih presiden dan wakilnya dengan jujur, bersih, dan adil sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Dalam sejarahnya pemilihan umum pada tahun 2004 merupakan pemilihan umum pertama yang dipilih langsung oleh rakyat untuk memilih presiden, wakil presiden, MPR, DPR, DPRD I, DPRD Kab/kota II akan tetapi dalam implementasinya terjadi berbagai masalah-masalah baru tentang sistem pemilu ini, masyarakat Indonesia sebagai konstituen dijadikan objek politik belaka banyak partai politik baru mulai bermunculan

menghiasi panggung perpolitikan di Indonesia, sistem multi partai yang di laksanakan di Indonesia membuat partai-partai baru mudah berdiri dengan berbagai visi dan misi yang berbeda tetapi dengan satu tujuan yang sama yaitu memperoleh kekuasaan semata, ketidak berdayaan pemerintah dalam hal ini sebagai pengambil kebijakan untuk membuat kebijakan yang tegas tentang sistem multi partai akan membuat jumlah partai yang memiliki legalitas untuk ikut dalam panggung politik akan terus bertambah. Partai politik di Indonesia sangat variatif, sistem kaderisasi kepemimpinan dari partai politik mayoritas berasal dari kalangan kapitalis orang-orang yang mempunyai modal tanpa memperhitungkan kualitasnya.

Pada pelaksanaan pemilu di Indonesia terjadi berbagai penyelewengan diantaranya sistem politik uang (money politic) masih tetap menjadi kultur di negara ini gampangnya masyarakat kita terkontraminasi dengan prakek politik seperti itu akan menghasilkan pemimpin ataupun perwakilan yang tidak amanah, politik uang atau politik perut merupakan suatu cara, bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang agar orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum sehingga dalam makalah ini penulis perlu membahas bahwasanya apakah sudah layak pelaksanaan pemilu di Indonesia dan bagaimana dengan kader-kader pemimpin yang berasal dari partai politik apakah sudah sesuai dengan kualifikasinya sebagai pengambil kebijakan maupun pelaksana utama kebijakan itu.

Menyikapi hal itu merupakan hal yang begitu krusial dan masih dianggap tabu oleh masyarakat maka penulis dalam hal ini menarik permasalahan yang menitikberatkan pada sistem kaderisasi partai sebagai alat untuk meningkatkan elektabilitas dan popularitas sehingga ekspektasinya kita akan paham begitu besar peranan partai politik dalam membentuk kader-kader pimpinan.

i. Manfaat Kaderisasi Partai Politik

Mendengar kata instan agak teringat dengan makanan yang biasanya dimakan secara instan karena proses pembuatannya instan. Instan memiliki arti langsung (tanpa dimasak lama) dapat diminum atau dimakan. Hal ini dapat dianalogikan untuk fenomena kader-kader partai politik hari ini yang ada di DPR. Instan dalam arti tanpa proses pengkaderan yang jelas. Mempunyai modal popularitas dan *lot of money* dapat membuat seseorang mewakili sebuah partai dalam events politik negeri ini. Menjustifikasi pernyataan beberapa orang termasuk ketua DPR bahwa proses kaderisasi partai politik yang buruk bisa membuat lembaga DPR juga buruk. Mungkin sebuah isu lama tetapi tanpa solusi.

Mencetak kader partai yang benar-benar mampu menterjemahkan ideologi, visi partai tentunya saya pikir titik temunya pada Indonesia yang sejahtera. Tetapi dengan proses pengkaderan seperti ini juga harus membangun semuanya, selain kemampuan pribadi juga harus membangun diri ke masyarakat (Popularitas) dan tentu saja masalah modal materi. Karena dengan kemampuan pribadi yang handal tidak cukup untuk masuk jadi anggota DPR tanpa popularitas dan juga materi. Kalau hanya mementingkan kemenangan saja saya pikir lebih mudah. Partai politik hanya bergerilya orang yang mempunyai popularitas dan juga banyak uangnya. Dua komponen ini saya pikir senjata untuk kemenangan. Tentu saja berlawanan dengan yang dijelaskan di awal tadi. Kader partai hasil dari sistem instan ini perlu dipertanyakan kredibilitasnya. Namanya juga instan jadi tanpa proses yang jelas (positif). Tetapi dengan cara instan ini lebih efektif dalam kemenangan partai politik semuanya mempunyai kelemahan dan kelebihan.

3. Tinjauan Tentang Popularitas dan Elektabilitas

a. Pengertian Popularitas dan Elektabilitas

Elektabilitas adalah tingkat keterpilihan yang disesuaikan dengan kriteria pilihan. Elektabilitas bisa diterapkan kepada barang, jasa maupun orang, badan atau partai. Elektabilitas sering dibicarakan menjelang pemilihan umum. Elektabilitas partai politik berarti tingkat keterpilihan partai politik di publik. Elektabilitas partai tinggi berarti partai tersebut memiliki daya pilih yang tinggi. Untuk meningkatkan Elektabilitas maka objek elektabilitas harus memenuhi kriteria keterpilihan dan juga populer.

Kata elektabilitas umumnya muncul berkaitan dengan pemilu, pilkada atau pilpres, seperti dulu waktu jelang pemilu 2014 dan pada beberapa daerah di Indonesia yang sedang mengadakan Pilkada. Kata Elektabilitas bisa dikaitkan dengan sosok yang akan dipilih atau nama partai peserta pemilu. Tidak pernah ada Elektabilitas itu dikaitkan dengan produk sepeda motor, padahal pada prakteknya Elektabilitas produk sepeda motor itu yang menentukan dipilih atau tidaknya oleh pembeli.

Sedangkan Popularitas adalah tingkat keterkenalan di mata publik. Meskipun populer belum tentu layak dipilih. Sebaliknya meskipun punya elektabilitas sehingga layak dipilih tapi karena tidak diketahui publik, maka rakyat tidak memilih. Untuk meningkatkan Popularitas dan Elektabilitas maka sangat tergantung pada teknik kampanye yang dipergunakan. Dalam masyarakat yang belum berkembang, kecocokan profesi tidak menjadi persoalan. Yang perlu diingat, tidak semua kampanye berhasil meningkatkan Popularitas dan Elektabilitas. Ada kampanye yang menyentuh, ada kampanye yang tidak menyentuh kepentingan rakyat. Sementara itu ada kampanye yang berkedok sebagai survei, dengan tujuan untuk mempengaruhi orang yang sulit membuat keputusan dan sekaligus mematahkan semangat lawan.

b. Dasar Mengukur Popularitas dan Elektabilitas

Beberapa survey yang lazim diadakan oleh lembaga survey:

- 1) Media framing baik cetak maupun elektronik
- 2) Membuat polling dengan teknologi SMS

Cara untuk meningkatkan elektabilitas yaitu:

- 1) Gunakan hasil survey dengan analisis SWOT
- 2) Mendesiminasikan visi misi kandidat melalui media massa
- 3) dan atau melalui forum-forum lintas warga. Biaya murah meriah dengan melalui sosial media namun keefektifannya belum teruji
- 4) Membuat opini dengan menyertai solusi di media massa

Hal-hal yang harus perhatikan dalam mengukur elektabilitas adalah:

- 1) Mengenali diri
- 2) Mengenali lawan politik
- 3) Kenali medan politik dalam melakukan pemetaan yang baik
- 4) Mengenali perilaku pemilih mengkondisikan diri menjadi bagian masyarakat untuk bisa mengetahui kebutuhan masyarakat
- 5) Disarankan untuk menyewa konsultan politik untuk mengukur Popularitas dan Elektabilitas agar presisinya tinggi.

c. Konsep Popularitas dan Elektabilitas Citra Politik

Popularitas dan Elektabilitas partai politik dapat kita ukur melalui citranya, sehingga pembahasan mengenai popularitas dan elektabilitas citra politik ini dianggap relevan.

1) Popularitas dan Elektabilitas

Dalam dunia politik terdapat konsep mengenai elektabilitas. Maka, sosok atau institusi yang elektabilitas adalah sosok/institusi yang mendapatkan simpati dan empati dari banyak orang, sehingga orang banyak berkeinginan untuk memilih atau bahkan memilikinya.

Popularitas lebih banyak berhubungan dengan dikenalnya seseorang, baik dalam arti positif, ataupun negatif. Dalam masyarakat, sering diartikan, orang yang populer dianggap mempunyai elektabilitas yang tinggi. Sebaliknya, seorang yang mempunyai elektabilitas tinggi adalah orang yang populer. Memang kedua konstataasi ini ada benarnya. Tapi tidak selalu demikian. Popularitas dan elektabilitas tidak selalu berjalan seiring adakalanya berbalikan.

Elektabilitas dijadikan tolok ukur utama suatu keberhasilan, orang atau instansi yang berkualitas tetapi tidak berada dalam lingkaran kekuasaan pun menjadi tersisih. Sebaliknya, mereka yang berada dalam posisi pusat perhatian akan menjadi rebutan. Kondisi ini disuburkan oleh kondisi dan karakteristik masyarakat Indonesia yang sebagian besar belum sadar politik dan berpendidikan rendah serta rendahnya partisipasi politik masyarakat.

Ada beberapa indikator utama yang membuat seorang figur dikatakan populer, antara lain, sedang menduduki posisi strategis, sering muncul di berbagai media massa, dan citranya positif dengan karakter dan sikap yang kuat. Pemerintah atau institusi yang berelektabilitas, dengan sendirinya diterima dan didukung oleh mayoritas rakyat, karena mereka mengenal tokohnya secara perseorangan dan mempercayainya secara keseluruhan, bahwa nilai dan kepentingan mereka akan terlindungi serta terpenuhi. Pemerintah dipercaya mampu secara politis dan teknis untuk menangani masalah. Maka, pemerintah menjadi kuat dan berwibawa. Kuat berarti punya dukungan luas. Berwibawa berarti diikuti rakyat keputusan atau kebijaksanaannya.

Bila kita memaknai beberapa pengertian popularitas dan elektabilitas yang tertera diatas maka dapat dibuat suatu asumsi bahwa popularitas dan elektabilitas meliputi: perilaku, pribadi, sikap dan

persepsi. Perilaku berkaitan dengan tindakan–tindakan yang dilakukan, sedangkan pribadi dan sikap berkaitan dengan perasaan dan emosi, dan persepsi berkaitan dengan tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Olehnya itu tingkat popularitas dan elektabilitas dapat diukur dengan memperhatikan unsur pengetahuan, sikap dan dukungan yang dimiliki oleh khalayak.

2) **Citra Politik**

Salah satu konsekuensi kognitif dari komunikasi politik yang sangat penting adalah terbentuknya citra politik yang baik bagi khalayak terhadap politikus atau pemimpin politik atau partai politiknya. Citra politik juga dapat terbentuk dari proses pembelajaran politik ataupun juga sosialisasi politik yang berlangsung terus-menerus.

Citra politik terbentuk atau terbangun dari informasi yang kita terima baik langsung maupun melalui media politik termasuk media masa. Citra politik sendiri dapat diartikan sebagai gambaran diri yang ingin diciptakan seorang tokoh masyarakat. Citra politik tersusun melalui persepsi yang bermakna tentang gejala politik, yang kemudian memaknai gejala itu dengan nilai, kepercayaan dan pengharapan yang berangkat dari pendapat pribadi kemudian dikembangkan menjadi pendapat umum.

Pemilihan wakil rakyat dan kepala daerah secara langsung telah membuat semakin pentingnya citra seorang figur maupun sebuah partai di mata konstituennya. Kandidat yang akan bertarung akan berusaha semaksimal mungkin membangun citra politiknya di masyarakat, baik melalui media perantara atau terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat.

Citra politik ini sangat berpengaruh terhadap popularitas seseorang atau sebuah institusi dalam hal ini partai, dimana jika citra

seseorang atau partai baik, maka meningkat pula popularitasnya, dalam hal ini semakin baik citra partai tersebut, maka akan semakin banyak yang menyukai dan mendukung partai tersebut. sebaliknya, citra kepopuleran dan simbol yang diciptakan akan jatuh bilamana mendapat serangan politik dari figur maupun partai. Simbol-simbol yang dibangun akan melemah jika telah hadir kekuatan baru yang mampu menandingi kekuatan yang telah dikonstruksi.

Dalam hal ini media massa sangat berpengaruh dalam pembentukan citra politik atau membentuk persepsi politik khalayak. Berita politik tentang tokoh politik, partai politik, dan kebijakan politik dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda dan citra politik yang berbeda bagi masing-masing orang. Itulah sebabnya citra politik diartikan sebagai gambaran seseorang tentang realitas politik yang tidak harus sesuai dengan yang sebenarnya.

d. Indikator Popularitas dan Elektabilitas Partai Politik

Untuk meningkatkan elektabilitas maka sangat tergantung pada teknik kampanye yang dipergunakan. Dalam masyarakat yang belum berkembang kecocokan profesi tidak menjadi persoalan. Yang perlu diingat tidak semua kampanye berhasil meningkatkan elektabilitas. Ada kampanye yang menyentuh ada kampanye yang tidak menyentuh kepentingan rakyat. Sementara itu ada kampanye yang berkedok sebagai survei, dengan tujuan untuk mempengaruhi orang yang sulit membuat keputusan dan sekaligus mematahkan semangat lawan.

Dalam penelitian psikologi sosial telah ditemukan secara luas bahwa informasi mengenai apa yang dilakukan sebagian besar orang mampu mempengaruhi perilaku individu. Salah satu teori yang sering digunakan adalah *bandwagon effect*. Teori ini berpendangan bahwa individu cenderung mengikuti apa yang dipikirkan dan dilakukan orang lain. Contoh sederhananya adalah orang berama-ramai mendengarkan musik

grup band tertentu karena melihat atau mendengar banyak orang mendengarkan music tersebut. Tidak hanya bermanfaat bagi target, *band wagon effect* juga bermanfaat bagi pelaku karena dapat menjadi *self fulfilling prophecy* (sebuah prediksi yang secara langsung atau tidak dapat menjadibenar).

Pendekatan sosiologis ini melihat perilaku memilih dipengaruhi oleh segala kegiatan yang berkonteks sosial. Afan Gafar (1992, hlm. 5), pendekatan sosiologis ini melihat tingkah laku pemilih dipengaruhi oleh jenis kelamin, status sosial, lingkungan keluarga, kelompok belajar, teman sepermainan dan juga kepercayaan seseorang. Namun menurutnya analisis mengenai organisasi formal yang diikuti oleh pemilih juga perlu diperhatikan, misalnya serikat buruh, kelompok pengajian dan sebagainya. Intinya, pendekatan sosiologis ini berasumsi bahwa perilaku pemilih dipengaruhi oleh status ekonomi, kelas sosial, agama dan ideologi. Pendekatan psikologis lahir akibat adanya kelemahan dari pendekatan sosiologis. Menurut pendekatan ini, *attitude* seseorang juga berpengaruh dalam melihat perilaku pemilih. Menurut Dennis Kanvanagh pendekatan perilaku pemilih terdapat lima pendekatan, yaitu pendekatan struktural, sosiologis, ekologis, psikologis sosial dan pilihan rasional. Pada pendekatan sosiologis didasarkan pada mobilitas seseorang yang ingin keluar dari kelompok untuk bergabung dengan kelompok lain yang dipengaruhi oleh latar belakang sosial ekonomi, demografi, tempat tinggal, pendidikan, dan pekerjaan. Pendekatan struktural didasarkan pada struktur yang dibangun, artinya pemilih melihat partai politik dari struktur sosial masyarakat, sistem kepartaian dan program yang ditonjolkan partai.

Pendekatan ekologis didasarkan pada unit teritorial. Kelompok masyarakat penganut agama, buruh, kelas menengah, suku bangsa (etnis) yang bertempat tinggal di daerah tertentu dapat mempengaruhi perubahan

komposisi pemilih terhadap pilihan mereka. Pendekatan pilihan rasional (*rational choice*) adalah pendekatan yang melihat adanya perhitungan untung rugi dalam melihat perilaku pemilih. Disini faktor pendidikan dan kesadaran pemilih sangat berpengaruh. pemilih dipengaruhi oleh dua hal utama, yaitu:

- 1) Faktor eksternal: Orientasi isu-isu yang berpusat pada pemecahan persoalan yang dihadapi masyarakat dan diangkat menjadi visi, misi, tujuan serta kebijakan program kerja.
- 2) Faktor internal: figur dan karakter kandidat melalui pembentukan image berupa citra, reputasi dan kredibilitas tanpa memperhatikan label partainya.

e. Popularitas dan Elektabilitas Partai Politik Pasca Pemilu 2014

Berdasarkan Temuan Dua Survei Nasional 28 Februari sampai 10 Maret 2014 dan 14-24 Maret 2014:

- 1) Partisipasi pemilihan dalam beberapa pemilu legislatif di Indonesia sejak 1955-2009 (tidak termasuk pada masa orde baru) secara umum tergolong tinggi 70% keatas.
- 2) Tertinggi pada pileg 1999 mencapai 93%. Pileg 1999 adalah pileg pertama yang dilakukan secara demokratis setelah jatuhnya rezim orde baru.
- 3) Menjelang 2014 tensi memilih berdasar suver nasional pada juli 2013, desember 2013, januari 2014, februari sampai maret 2014 dan maret 2014, menunjukkan angka yang berpariasi. Tertinggi pada januari 2014 dan maret 2014 mencapai 93% mendekati april 2014 trend intense memilih justru menurun.
- 4) Pada survey maret 2014, intense untuk memilih menurun, sebanyak 76% calon pemilih menjawab “pasti ikut memilih” jika pemilih anggota DPR diadakan dihari ini masih ada yang tidak pasti atau ikut memilih.

- 5) Intensi memilih lebih tinggi pada kelompok masyarakat dipedesaan dibandingkan diperkotaan.
- 6) Pemilih pemula yang kemungkinan besar pertama ikut pemilu intense memilihnya lebih rendah disbanding pemilih lain
- 7) Pemilih dengan pendidikan lebih tinggi intense memilihnya cenderung lebih rendah.
- 8) Kelompok pemilih yang berpendapatan lebih tinggi intense memilihnya lebih rendah disbanding kelompok pemilih berpendapatan paling rendah, kalangan pemilih tengah-tengah cenderung lebih rendah lagi.

B. Penelitian Terkait

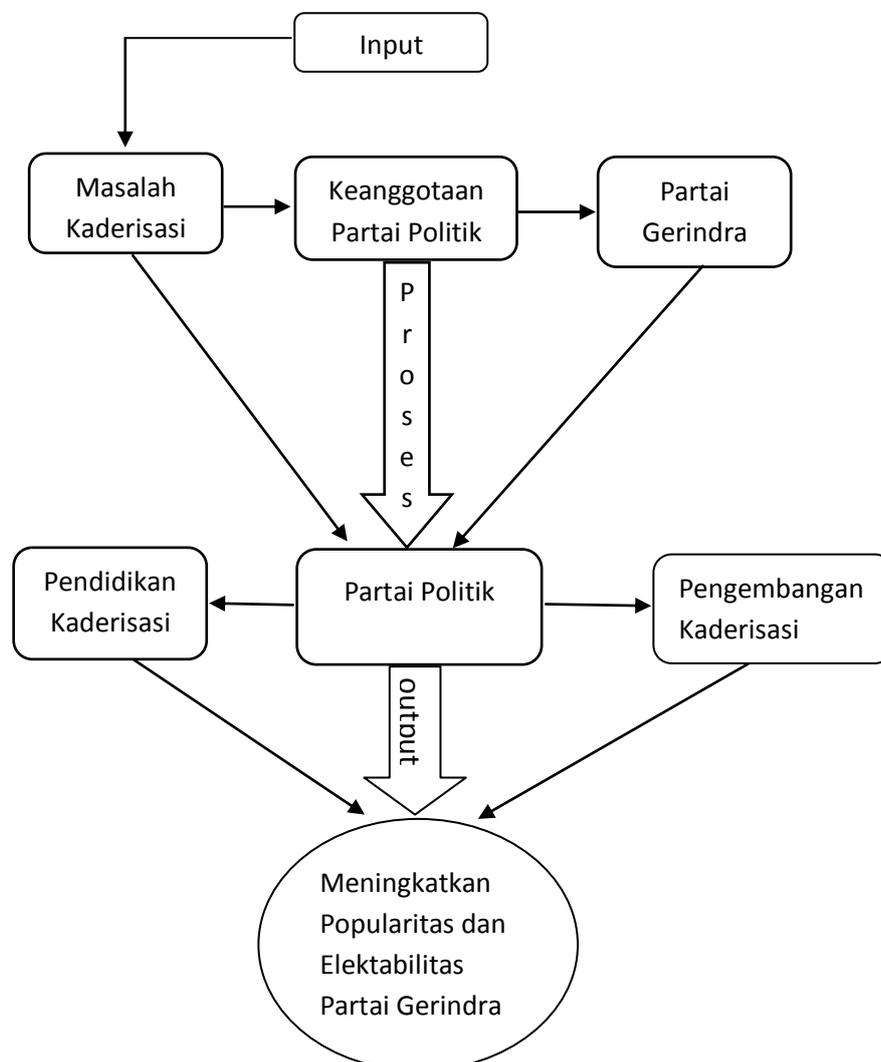
Pola Rekrutmen Partai Demokrat Dalam Menetapkan Caleg Pada Pemilu Legislatif 2009 Kabupaten Agam (Wengki Saputra, 2012). Kabupaten Agam dalam pola rekrutmen partai politik kepada masyarakat secara umum melalui Dewan Pimpinan Cabang dengan cara pertemuan-pertemuan rutin.

Hasil penelitian menjadikan pola rekrutmen Partai Demokrat dalam menetapkan calon legislatif pada pemilu legislatif 2009 dikabupaten Agam.

Penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti adalah Fungsi dan Peran Kaderisasi dalam meningkatkan Popularitas dan Elektabilitas Partai Politik Dikalangan Masyarakat di Dapil 2 Kabupaten Indramayu.

C. Kerangka Berpikir

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



D. Pertanyaan Penelitian

1. Penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti adalah fungsi dan peran kaderisasi dalam meningkatkan popularitas dan elektabilitas partai politik dimasyarakat, Bagaimana proses kaderisasi yang dijalankan DPC Partai Gerindra Kabupaten Indramayu?
2. Bagaimana proses pelaksanaan kaderisasi yang dilaksanakan DPC Partai Gerindra Kabupaten Indramayu kepada para kadernya?
3. Apakah tujuan pelaksanaan kaderisasi politik yang dilaksanakan DPC Partai Gerindra Kabupaten Indramayu?
4. Kendala apa yang ditemui selama menjalani proses kaderisasi di DPC Partai Gerindra Kabupaten Indramayu untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas Partai Gerindra?
5. Upaya apa yang dilakukan DPC Partai Gerindra dalam menjalani proses kaderisasi?